**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESAIN INDUSTRI
BERDASARKAN PASAL 54 UU NO. 31 TAHUN 2000**

AMYATI

155100005,785567966

Fakultas Komputer

amyati.student@umitra.ac.id

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dan bagaimana bentuk tindak pidana di bidang desain industri dan bagaimana penanggulangannya serta bagaimana persoalan penyidikan terhadap tindak pidana desain industri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak desain industri bagi pendesainnya sendiri termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama dari segi ekonomi secara melawan hukum atas keberadaan suatu desain industri. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan baik dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana. 2. Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hanya ada empat bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan tindak pidana hak cipta yang terdiri atas empat belas macam. 3. Dalam hal penyidikan tindak pidana desain industri, perbedaannya sekedar ditentukan oleh adanya pejabat penyidik lain yang berhak pula melakukan penyidikan perkara tindak pidana desain industri.

Kata kunci: Tindak pidana, Desain Industri.

A. INTRODUCTION

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang Desain Industri (UUDI), ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi kepentingan hukum terhadap hak desain industri :

- 1) Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- 2) Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri.
- 3) Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Menurut Pasal 1 UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000 (UUDI) yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari batasan hukum tentang desain industri tersebut terlihat bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara hak cipta dan hak paten. Jika batasan itu dirinci, ada tiga unsur pokok yang membentuk pengertian desain industri. a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari keduanya. b. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi c. Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi d. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.⁴ Apabila empat unsur tersebut diamati, ternyata unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh hak cipta. Sementara itu, unsur yang disebutkan huruf d merupakan unsur yang dilindungi oleh hukum paten.⁵ Seperti hak cipta atau hak paten dan hak-hak lain dalam HaKI, hak desain industri merupakan hak eksklusif bagi pendesain atas desain industri hasil kreasinya. Ada dua hak eksklusif pendesain, yakni hak melaksanakan sendiri desain industri kreasinya dan hak memberikan persetujuan ataupun melarang kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri miliknya tersebut (Pasal 5 ayat 1 Jo. Pasal 9 ayat (1) UUDI). Persetujuan untuk melaksanakan hak desain industri pada pihak lain sifatnya sekedar pemberian hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan tidak bersifat mengalihkan hak.⁶ Dalam hak desain industri terdapat hak moral

(moral right) yang tetap ada di tangan pendesain, sama dengan pencipta atas ciptaannya. Hak moral yang terdapat dalam hak desain industri bagi pendesain demi hukum selalu melekat pada pendesain dan tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun hak moral dalam hak desain industri yang dimiliki oleh pendesain implementasinya dalam UUDI dapat dilihat pada Pasal 32 UUDI. Pasal 32 UUDI merumuskan Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri. Terbitnya hak desain industri tidak sama dengan hak cipta yang timbul demi hukum atas suatu ciptaan. Setelah dihasilkan suatu ciptaan oleh pencipta maka ketika hak cipta telah terbit, pendaftaran atas ciptaan ke Dirjen Haki hanya bersifat fasilitatif dan inventarisasi, dan bermanfaat untuk mempermudah pembuktian hak cipta bila ada persengkataan atau tindak pidana terhadap hak cipta. Berbeda dari terbitnya hak desain industri, hak desain industri sama dengan hak perlindungan varietas tanaman yang terbit karena diberikan oleh Negara atas permohonan hak desain industri. Sebagaimana pengertian desain industri pada Pasal 1 angka 1 yang telah disinggung sebelumnya objek desain industri adalah suatu kreasi yang memenuhi empat/syarat.

a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya.

b. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi

c. Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi

d. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri terbit sejak Dirjen Haki mengabulkan permohonan hak desain industri dengan menerbitkan sertifikat desain industri, hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain sebelumnya: - Tanggal penerimaan permohonan; atau - Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; - Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Hak cipta berlangsung terus dan melekat sepanjang hidup pencipta, bahkan demi hukum diwariskan kepada ahli waris selama 50 tahun berikutnya setelah pencipta meninggal dunia. Setelah itu baru bisa menjadi milik publik. Sementara itu, hak desain industri diberikan oleh Negara terbatas berlakunya, yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hak. Dalam jangka waktu itu saja, hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum. Setelah berlakunya habis, baru menjadi milik umum dan desain industri berfungsi sosial. Subjek hukum yang mendapat perlindungan hukum adalah

pendesain sendiri sebagai pemegang hak desain industri. Selain itu, juga pihak lain yang menerima hak dari pendesain melalui pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud sebab-sebab lain yang terakhir misalnya karena adanya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pemegang lisensi karena perjanjian lisensi juga menjadi pemegang hak desain industri. Meskipun demikian, pendesain sebagai pemegang hak desain industri juga memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak desain industri, kecuali jika diperjanjian lain.

2. Penyidikan Tindak Pidana Desain Industri

Pasal 53 menyatakan bahwa setiap penyidik Polri ditetapkan juga penyidik lain dari pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan department yang lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang HAKI, yang diberi kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang desain industri.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penyidik pejabat pegawai negeri sipil tersebut wajib melakukan koordinasi dengan penyidik Polri di wilayah hukum mana kasus tindak

pidana desain industri tersebut terjadi. Wujud koordinasi tersebut yakni melaporkan hasil penyidikan pada penyidik Polri. Di samping itu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP disampaikan pada kejaksaan negeri setempat sebagai pejabat penuntut umum. Hasil penyidikan juga disampaikan pada kejaksaan negeri melalui penyidik Polri.

B. CONTENT STUDI KASUS :

Alpenliebe adalah salah satu merek permen yang banyak digemari masyarakat Indonesia di masa kini. Permen Alpenliebe pada awalnya dikenal masyarakat Indonesia sebagai permen dengan rasa karamel. Seiring dengan perkembangan waktu, Perfetti Van Melle S.P.A sebagai produsen permen Alpenliebe tersebut juga melakukan inovasi terhadap produknya dengan meluncurkan produk baru yaitu Alpenliebe Lollipop.

Permen Alpenliebe Lollipop yang beredar di pasaran Indonesia ternyata sempat menimbulkan sengketa desain industri dengan salah satu produk permen dalam negeri milik pengusaha Indonesia. Agus Susanto adalah salah satu pengusaha permen asal Indonesia yang memproduksi permen Lollyball bermerek Yoko. Agus mengajukan gugatan pembatalan desain industri Perfetti Van Melle S.P.A untuk jenis produk permen Alpenliebe Lollipop. Gugatan Agus dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada

bulan Juli 2009. Persidangan perkara No.42/DesainIndustri/2009/PN.NIAGA .JKT.PST sudah memasuki babak akhir. Masalahnya bersumber dari kesamaan desain permen Lollyball dengan desain permen Lollipop. Desain industri milik Perfetti Van Melle terdaftar dalam sertifikat No. ID 004058 tanggal 8 Januari 2003 dengan judul Lollipops.

Menurut kuasa hukum Agus dari Pieter Talaway & Associates, kesamaan itu terletak pada bentuk dan konfigurasi. Namun dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci dimana letak kesamaannya. Kesamaan itu dapat mengecoh masyarakat tentang asal usul atau sumber produk Agus dan Perfetti Van Melle sehingga bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Desain industri permen Alpenliebe dinilai tidak memiliki kebaruan. Karena itu, dalam petitum gugatan, Agus meminta majelis hakim agar membatalkan desain industri milik Perfetti Van Melle. Sebab sebelum Perfetti Van Melle mendaftarkan desain industri permen Alpenliebe, konfigurasi desain sudah beredar luas (*public domain*). Perfetti Van Melle dinilai tidak beritikad baik dalam mendaftarkan desain industri. Agus sendiri telah memproduksi permen Yoko sejak tahun 1999. Ia juga telah mengantongi sertifikat merek No. 460924 pada 5 Januari 2001. Kemudian diperpanjang dengan sertifikat No. IDM 000194839.

Kuasa hukum Perfetti Van Melle dari Soemadipraja & Taher, menyatakan gugatan Agus tidak berdasar. Karena

Agus sendiri tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki hak eksklusif atas desain permen Lollyball. Apalagi, melarang pihak lain untuk menggunakan desain yang menyerupai desain permen Lollyball. Faktanya, etiket desain industri permen Lollipops dan Lollyball pun berbeda. Etiket merek permen Lollyball memiliki berbagai macam unsur gambar. Selain itu, pada desain produk permennya terdapat garis di permukaan. Sementara, pada permukaan permen Lollipops bergaris dengan alternatif warna yang berbeda. Garis itupun bervariasi, ada yang horisontal, diagonal kiri ke kanan atau sebaliknya dan atau tidak beraturan/bervariasi.

Dalam rezim hukum desain industri tidak dikenal konsep kemiripan atau persamaan pada pokoknya dalam konsep perlindungan desain industri di Indonesia. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan sertifikat desain industri untuk produk Perfetti Van Melle menunjukkan pendaftaran desain industri tidak bermasalah. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Pendaftaran sertifikat desain industri Perfetti Van Melle telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Ketika, masapengumuman tidak ada pengajuan keberatan terhadap pemohon pendaftaran desain industri yang diumumkan. Kuasa hukum Perfetti Van Melle menilai tidak mungkin perusahaan asal Italia itu

membahayakan reputasinya dengan meniru desain permen dari produsen lain.

ANALISIS KASUS

Kasus sengketa desain industri antara permen Alpenliebe Lollipop dengan permen Yoko Lollyball pada dasarnya diawali karena adanya kemiripan di antara kedua produk tersebut dalam hal bentuk dan konfigurasi. Gugatan yang diajukan oleh Agus Susanto kurang memiliki dasar pertimbangan yang kuat karena Agus sendiri tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki hak eksklusif atas desain permen Lollyball. Selain itu dari pihak kuasa hukum Agus juga tidak dapat menjelaskan secara rinci di mana letak kesamaannya.

Gugatan Agus semakin diperlemah dengan adanya fakta yang dapat ditunjukkan pihak Perfetti Van Melle bahwa etiket desain industri permen Lollipops dan Lollyball berbeda. Bukan hanya itu, Perfetti Van Melle juga dapat membuktikan bahwa produk Alpenliebe Lollipop telah mendapatkan sertifikat desain industri. Pendaftaran sertifikat desain industri Perfetti Van Melle telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Ketika, masa pengumuman tidak ada pengajuan keberatan terhadap pemohon pendaftaran desain industri yang diumumkan. Berdasarkan kondisi tersebut, gugatan yang diajukan oleh Agus Susanto memang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya

pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh pihak Perfetti Van Melle.

Desain industri permen Lollyball seharusnya segera didaftarkan ketika baru tercipta. Gugatan Agus Susanto menjadi gugatan yang lemah karena Agus sendiri tidak memiliki sertifikat desain industri atas permen Lollyball. Meskipun telah memiliki sertifikat merek No. 460924 pada tahun 2001, namun hal ini belum lengkap tanpa adanya sertifikat atas desain industri. Jika kondisinya seperti ini, permen Lollyball hanya mendapat perlindungan atas merek dagangnya, namun tidak mendapat perlindungan dan pengakuan atas desain industrinya. Oleh sebab itu, pendaftaran legalitas atas suatu produk haruslah lengkap dan dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diperlukan agar produsen memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sah atas hak milik perindustrian untuk produk yang dimilikinya.

C. CONCLUSION

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri terbit sejak Dirjek Haki mengabulkan permohonan hak desain industri dengan menerbitkan sertifikat desain industri, hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain sebelumnya: - Tanggal penerimaan permohonan; atau - Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; - Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Hak cipta berlangsung terus dan melekat sepanjang hidup pencipta, bahkan demi hukum diwariskan kepada ahli waris selama 50 tahun berikutnya setelah pencipta meninggal dunia. Setelah itu baru bisa menjadi milik public. Sementara itu, hak desain industri diberikan oleh Negara terbatas berlakunya, yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hak. Dalam jangka waktu itu saja, hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum. Setelah berlakunya habis, baru menjadi milik umum dan desain industri berfungsi sosial. Subjek hukum yang mendapat perlindungan hukum adalah pendesain sendiri sebagai pemegang hak desain industri.

D. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGI BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."
- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF

- PARADOX DBASE.”
- [11] A. S. Putra, “IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE.”
- [12] A. S. Putra, “IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI WWW.PUBLIKLAMPUNG.COM.”
- [13] A. S. Putra, “IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY.”
- [14] A. S. Putra, “MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0.”
- [15] A. S. Putra, “PATENT AS RELEVAN SUPPORT RESEARCH.”
- [16] A. S. Putra, “PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc.”
- [17] A. S. Putra, “PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT.”
- [18] A. S. Putra, “QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING.”
- [19] A. S. Putra, “REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK.”
- [20] A. S. Putra, “REVIEW TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0.”
- [21] A. S. Putra, “TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, “Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya),” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province,” in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181–187.
- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, “Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung,” *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, “Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel,” *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.